

POLITIK EKOLOGI HIJAU (PERSPEKTIF ISLAM) DALAM KONTESTASI PEMILU 2024

Miftakhur Ridlo

Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto
ridlo@lecturer.uluwiyah.ac.id

Moch. Yunus

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo
mochyunus701@gmail.com

Abstract

This article discusses environmental studies related to green ecological politics (Islamic perspective) in the context of the 2024 election. The phenomenon of negating nature and environmental sustainability can also be caused by modern science, where because of this factor—humans ignore the environment. The method used in this writing is descriptive qualitative, which attempts to express socio-political phenomena clearly and precisely. The result of this research is that Islam offers the concept of ecological jurisprudence by considering various aspects, especially those related to industrial development. Green political theory is a political ideology that aims to create an ecologically sustainable society that is rooted in concern for the environment, social justice and democratic life which is built from the behavior and culture of each individual. The 2024 election contest presents three pairs of candidates, of course those who are able to offer green ecological ideas and politics for the creation of an adequate environmental ecosystem for the sustainability of life in Indonesia will be able to attract voters. The three candidate pairs have a vision and mission in the environmental sector, all of which concentrate on environmental maintenance, renewable energy which will have a positive and economic impact on society.

Keywords: *Green Ecological Politics, 2024 Election Contestation*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang kajian lingkungan berkaitan dengan politik ekologi hijau (perspektif Islam) dalam konteks pemilu 2024. Fenomena penegasian kelestarian alam dan lingkungan juga bisa disebabkan oleh sains modern, di mana karena faktor itu—manusia abai terhadap lingkungan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif deskriptif, yang berupaya mengungkapkan fenomena sosial politik dengan jelas dan tepat. Hasil dari penelitian ini adalah Islam menawarkan konsep fiqih ekologi dengan mempertimbangkan berbagai aspek khususnya terkait pengembangan industri. Teori politik hijau merupakan ideologi politik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan secara ekologis yang berakar pada kepedulian terhadap lingkungan hidup, keadilan sosial dan kehidupan demokrasi yang dibangun dari perilaku dan budaya yang dimiliki setiap individu. Kontestasi pemilu 2024 menghadirkan tiga pasangan calon, tentunya yang mampu menawarkan gagasan serta politik ekologi hijau demi terciptanya ekosistem lingkungan yang memadai dalam keberlanjutan kehidupan di Indonesia akan dapat menarik pemilih. Ketiga paslon mempunyai visi dan misi bidang lingkungan, yang kesemuanya konsentrasi kepada pemeliharaan lingkungan, energi terbarukan yang nantinya mempunyai dampak positif dan ekonomis bagi Masyarakat.

Kata Kunci: Politik Ekologi Hijau, Kontestasi Pemilu 2024

PENDAHULUAN

Hingga saat ini kajian Lingkungan menjadi isu nasional dan internasional, mengapa hal tersebut terjadi? karena kegiatan perekonomian yang berbanding lurus dengan upaya mengeskplotasi sumber daya alam. Manusia merupakan salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan, di mana ia sebagai pemeran utama/aktor yang menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik primer, sekunder maupun tersier. Topik tentang lingkungan hidup sekaramg sering muncul dalam skala nasional maupun internasioanal. Kian tumbuh-pesatnya era globalisasi membuat manusia di tuntutan mengejar standar kehidupan yang lebih tinggi—ternyata hal itu menimbulkan potensi yang mengancam eksistensi lingkungan hidup. Sebelumnya pandangan dunia, baik nasional maupun internasional hanya terkristal pada kegiatan manusia sebagai perwakilan dari negara. Namun, dikemudian hari beberapa orang memiliki pandangan yang lain dalam kajian nasiona maupun internasional, yaitu kegiatan manusia yang berdampak pada terganggunya kelestarian alam dan lingkungan.

Fenomena penegasian kelestarian alam dan lingkungan juga bisa disebabkan oleh sains modern, di mana karena faktor itu—manusia abai terhadap lingkungan. Sardar pernah berujar Wacana integrasi sains dengan Islam menemukan signifikansinya, hal ini cukup beralasan ketika diletakkan dalam bingkai wacana “krisis sains” yang telah terjadi di negara-negara Barat. Sains yang seharusnya menjadi alat “penyelamat dan mempermudah” kehidupan manusia, secara di luar dugaan telah menjadi kekuatan jahat yang mengancam eksistensi manusia itu sendiri sebagai pencetus sains. Perkembangan sains justru menjadi kekuatan perusak yang dapat memberangus keseimbangan alam semesta. Pesatnya teknologi berbasis produksi yang mengakibatkan menipisnya sumber daya alam, target pendapatan perkapita yang menekan lingkungan, limbah yang tak terkendali, serta bahaya nuklir, senjata kimia dan biologi, merupakan bentuk ancaman sains bagi kehidupan manusia masa depan (Sardar, 1984).

Dari fenomena maraknya tindakan yang anti lingkungan, muncullah Teori politik hijau yang berupaya memberikan kritik terhadap manusia yang sudah menjadi aktor dominan dalam kerusakan lingkungan. Disini para pengembang politik hijau mempunyai tujuan, yaitu untuk mengejawantah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini dimaksudkan untuk memikirkan dan mengupayakan kelestarian alam dan lingkungan untuk generasi saat ini dan di masa yang akan datang. Setelah muncul modernisasi yang terjadi pada abad 20, isu mengenai lingkungan mulai menjadi sorotan dalam dunia Internasional. Banyaknya krisis lingkungan yang terjadi di beragai belahan bumi juga menjadi satu alasan

utama di angkatnya masalah lingkungan dalam dunia Internasional. Tidak hanya pada skala internasional—pada level nasional isu ini juga mengundang perdebatan yang tak kunjung usai.

Kontestasi pemilu 2024 menghadirkan tiga pasangan calon, tentunya yang mampu menawarkan gagasan serta politik ekologi hijau demi terciptanya ekosistem lingkungan yang memadai dalam keberlanjutan kehidupan di Indonesia akan dapat menarik pemilih. Gagasan solutif dan kampanye inovatif diperlukan oleh ketiga pasangan calon Presiden untuk membawa Indonesia kepada Politik Ekologi Hijau yang menjadi percontohan di Asia Tenggara bahkan di dunia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif deskriptif, yang berupaya mengungkapkan fenomena sosial politik dengan jelas dan tepat. Pengumpulan data diperoleh melalui studi literatur dari beragam sumber kredibel dan relevan yang dapat membantu menguatkan argument dalam artikel ini. Setelah mengumpulkan berbagai sumber kajian literatur, kemudian disusun ke dalam bentuk satu tulisan yang utuh. Penulisan ini bertujuan untuk menguraikan analisis dan memberikan gambaran mengenai politik ekologi hijau dalam kontestasi pemilu 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Masyarakat dan Konsep Politik Ekologi

Dalam konteks kerusakan lingkungan dan deforestasi taman nasional, sangat perlu dipikirkan untuk merealisasikan konsep “politik ekologi” dalam mengatasi deforestasi. Banyak pakar berpendapat mengenai politik ekologi. Peterson (2000:53) mengatakan, bahwa “politik ekologi” adalah suatu pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan dengan politik ekonomi dan dinamika antara lingkungan dan manusia, dan antara kelompok bermacam-macam di dalam masyarakat dalam skala dari individu local kepada transnasional secara keseluruhan. Ilmuwan mendefinisikan “politik ekologi” sebagai “suatu bingkai untuk memahami kompleksitas saling berhubungan antara masyarakat lokal, nasional, politik ekonomi global dan ekosistem. Jadi implemmentasi pendekatan lingkungan oleh semua pemangku kepentingan, yakni dengan melaksanakan program reforestasi dan reboisasi, proteksi atas binatang tertentu (orang utan, burung maleo, banteng, dan sebagainya) dan politik ekonomi, yakni dialog mengenai kewenangan pengelolaan taman nasional antara pemerintah pusat dan daerah serta aksi melakukan program pemberdayaan bagi peningkatan

sosial ekonomi masyarakat local, seharusnya digunakan dalam menganalisis keadaan taman nasional (Hidayat, 2011).

Konsep politik ekologi juga mendiskusikan peran *stakeholder* dalam turut serta mengelola taman nasional. Dalam kaitan studi di delapan taman nasional, dipakai konsep politik ekologi yang menekankan peran *stakeholder* dalam pengelolaan taman nasional misalnya (Bukit Tigapuluh, Keinci, Seblat, Baluran, Bali Barat, Tanjung Putting, Kutai, Rawa Aopa Watumohai, dan Bogani Nani Wartabone)—karena masing-masing mempunyai karakter dan tantangannya. Ada *stakeholder* yang memfokuskan pada *actors movement* (pergerakan pelaku), baik yang bersifat *direct actors* (pelaku langsung) misalnya, (pemerintah Pusat/Kepemerintahan Kehutanan (Dirjen PHKA), pemerintah provinsi (Dinas Kehutanan Kabupaten). Sebaliknya, peran *indirect actors* (pelaku tidak langsung) misalnya aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) baik lokal maupun internasional, akademisi, lembaga donor, swasta, dan masyarakat local sendiri dalam turut serta menjaga dan melestarikan taman nasional.

Toke (2000) berpandangan, bahwa yang dianggap sebagai gelombang pertama kesadaran lingkungan terjadi di bagian akhir abad kesembilan belas ketika kelompok-kelompok lingkungan didirikan terutama untuk melindungi hal yang dipandang sebagai estetika pedesaan. Pada tahun 1960 gerakan lingkungan modern dibentuk, dengan adanya keprihatinan, bahwa polusi dan pengurasan sumber daya yang mengancam kemampuan manusia untuk bertahan hidup. Pada 1980-an gelombang ketiga, tema lingkungan 1960 diungkapkan lagi dengan agenda global yang lebih eksplisit dan beralih jauh dari konsentrasi sumber daya alam serta masalah populasi, dan terhadap polusi.

Teori politik hijau merupakan ideologi politik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan secara ekologis yang berakar pada kepedulian terhadap lingkungan hidup, keadilan sosial dan kehidupan demokrasi yang dibangun dari perilaku dan budaya yang dimiliki setiap individu. Teori politik hijau menekankan pada tiga prinsip: 1. Mendistribusikan keadilan, 2. Berkomitmen pada proses demokratisasi, 3. Upaya mencapai keberlanjutan ekologi.

Peduli lingkungan adalah salah satu dari ciri khas politik hijau/ekologisme. Beragam alasan bisa dikemukakan, manusia harus berhati-hati (menjaga) lingkungan—kepedulian kepada lingkungan, karena itu kepentingan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan memiliki nilai intrinsik—artinya, bahwa nilai itu tidak akan habis sebagai sarana tujuan manusia, bahkan manakala manusia sudah berakhir, lingkungan masih memiliki nilai tersebut. Kita mengerti argumentasi—semisal, bahwa hutan hujan tropis harus dilestarikan karena

memberikan oksigen, atau bahan baku untuk obat-obatan, atau bisa jadi karena hutan tersebut mencegah longsor/bencana alam (Dobson, 2007). Barangkali, begitu pula dengan lahan sawah petani di Rembang untuk melestarikan penghijauan dan ketahanan pangan, sehingga tidak perlu mengimpor dari luar negeri.

Teori politik keadilan menentangakan topik bahasan utama konsep keadilan tidak hanya dipengaruhi oleh inderawi bentuk adil itu seperti apa tapi juga menggambarkan masyarakat yang adil yang realistik itu bagaimana. Keadilan awalnya dikonsepsi sebagai konsep untung rugi yang sifatnya ekonomis, konsep keadilan kemudian diabstraksikan dalam sudut pandang social yang digunakan dalam menjelaskan masyarakat dan regime (Putri, 2014).

Dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam teori politik, serta semakin berkembangnya sains (Bradford, 2016) dan teknologi, lingkungan dan ekologi menjadi salah satu permasalahan dan hal baru yang sangat menarik dalam kajian ilmu politik. *Green politics* atau politik hijau dikaji berawal dari adanya masalah dalam distribusi keadilan, demokrasi, dan *sustainability development* yang berhubungan dengan lingkungan sebagai tempat hidup manusia, dimana teori politik klasik banyak mengabaikan hal tersebut.

Teori politik hijau dapat dipahami sebagai bentuk teori politik yang diterapkan, dan di sini terdapat beragam fitur dengan ideologi lain yang semuanya berupaya untuk membuat perbedaan, serta berupaya mengubah dunia atau masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip politik tertentu. Tugas politik hijau sebagai pendekatan adalah untuk menganalisis beberapa prinsip etika, semisal demokrasi, keadilan, dan kewenangan dan melihat situasi nyata (empiris) yang dihadapi umat manusia. Artinya bagaimana kebijakan publik terbaik dapat diimplementasikan (Barry, 2017).

Pada dasarnya pendekatan ekologisisme berangkat dari pemahaman terhadap makna lingkungan secara verbal (bahasa) dan praktiknya. Substansinya adalah, bahwa lingkungan merupakan tempat beragam pilihan tentang konsepsi dan tempat terlaksananya kehidupan, baik manusia maupun makhluk hidup yang lain. Peran lingkungan tidak hanya sebagai suatu keanekaragaman sumber daya dari segala jenis makhluk hidup, bukan hanya jenis sumber daya yang dibutuhkan untuk bertahan hidup secara filosofis, namun juga sebagai sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi segala pola kehidupan.

Bagi sebagian pemerhati ekologi politik, sains dan perkembangan teknologi adalah bagian utama dari penyebab kerusakan lingkungan. Pandangan ini menunjuk pada perkembangan ilmiah dan perkembangan teknologi seperti tenaga nuklir, mesin pembakar

internal, bioteknologi, dan pada umumnya pemanfaatan sains dan teknologi guna menghasilkan cara-cara yang semakin efektif untuk menghabiskan sumber daya alam.

2. Islam Kontekstual, Kehidupan Manusia, dan Keindahan dalam Signifikansinya

Bicara tentang Islam tak akan pernah ada habisnya. Entah itu dilihat dari sisi tingkatan atau pun dari sisi sandaran yang melakat padanya. Ini artinya Islam tetap menjadi kajian hangat dan menarik seiring bergulirnya waktu. Sudah jamak kita ketahui bahwa Islam merupakan bentuk dari risalah kenabian yang diamanahkan pada Nabi Muhammad. Hal ini sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh kalangan teolog muslim (mutakallimin) dalam hal ini mereka sepakat menyebut risalah kenabian tersebut dengan agama Islam. Alasan penamaan ini adalah upaya membedakan antara ajaran yang dibawa oleh Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Jika menelisik pandangan teolog tersebut tampak sekali mereka lebih mengedepankan unsur kesejarahan dibandingkan substansi dari Islam. Dengan mengikuti logika berpikir ini, artinya terdapat dua pengertian terkait terma “Islam”: Islam sebagai sikap dan Islam sebagai institusi.

Islam dalam arti institusi resmi dimulai saat diutusnya Muhammad ibn Abdullah (usia 40 tahun) pada abad ke-7 M. tepatnya pada malam 17 Ramadhan tahun 610 M, saat bertahannuts (beribadah menyendiri) di Gua Hira, sebagai tradisi ajaran Hanif. Dua tahun kemudian setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad barulah berdakwah secara terang-terangan. (lihat Sa’dulloh Affandy dalam *Menyoal Agama-agama Pra Islam*, Hal. 185.). Lalu, bagaimana dengan Islam sebagai sikap. Islam yang semacam ini merupakan cerminan dari terlabuhnya Islam (kepasrahan pada Allah) dan iman (keyakinan pada Allah) yang kemudian diaksikan secara nyata dalam pergumulan bermasyarakat. Ini artinya ia tidak terhenti pada ranah institusi maupun ranah historis. Ia berkembang pada ranah aksi dari hasil perenungan mendalam dan keyakinan yang terlabuh dalam hati.

Adalah Descartes yang ber-Islam bukan pada ranah fisik/jughrafi, yakni ber-Islam karena keterpaksaan atau faktor lingkungan. Namun ia ber-Islam secara aktual. Apa yang saya maksud dengan secara actual ialah ber-Islam karena keyakinan dan kebenaran dari hasil penelitian dan fanatisme. Ini merupakan secuil contoh dari Islam secara sikap. Senyatanya jika melihat sejarah, maka Islam secara sikap sudah ada sebelum Islam secara institusi. Dalam hal ini Nurcholis Madjid menuturkan bahwa yang pertama kali dituturkan secara harfiah dalam kitab suci dengan menyadari al-Islam sebagai sikap pasrah kepada Tuhan sebagai inti agama adalah Nabi Nuh. Nuh mendapatkan perintah untuk menjadi seorang Muslim, pelaku dan bersifat al-Islam.

Secara prinsip ajaran Islam yang tidak dipahami secara sepotong-potong mencerminkan sebuah pandangan yang menyejukkan terhadap kehidupan dan keindahan. Islam melihat kehidupan sebagai realitas yang harus dijalani secara serius dan disikapi secara bijaksana. Kehidupan merupakan muara dari eksistensi, kekuasaan, dan bahkan segala sifat Tuhan. Umat Islam dituntut untuk mengartikan penandaan itu dalam kehidupan mereka. Pada sisi kehidupan inilah umat manusia, terlebih umat Islam berupaya melestarikan kehidupan di muka bumi ini dengan mewarnai kehidupan dunia sehingga lahir tatanan yang berkeadilan dan bermartabat dalam relung-relung kehidupan. Mereka terus merajut Islam kontekstual dan membangun peradaban dunia. Tak pelak dengan adanya upaya tersebut upaya penihilan perusakan manusia dan masa depannya adalah keniscayaan.

Selanjutnya, pada sisi keindahan—umat Islam dituntut membendung sebisa mungkin upaya perusakan secara fisik maupun secara etika-moral yang mengarah pada kebodohan masa kini. Keindahan harus dibangun dan dikembangkan sebagai bentuk konkrit pengabdian manusia pada Tuhan dalam upaya menuju keberagamaan yang paripurna. Dalam pandangan Islam kontekstual, hal yang semacam itu merupakan prinsip yang harus dibangun dan diperkokoh oleh umat Islam secara khusus, dan umat manusia secara umum. Ini sangat sesuai dengan karakter manusia yang senantiasa mendambakan kehidupan yang damai dan keindahan yang tak lekang oleh waktu, dimana pada posisi ini manusia merupakan subyek. Adapun kehidupan dan keindahan merupakan obyek.

Penyandaran Islam pada kontekstual adalah bentuk tarkib idhafi (susunan frase) yang bisa dijadikan rujukan dalam mengolah dunia. Mengingat sifat-sifat kehidupan yang selalu dinamis, berubah dari waktu ke waktu, dan bertumpu pada lokalitas. Sedangkan mengingat watak manusia mengindikasikan kehidupan harus mampu mengakomodasi kebutuhan manusia sebagai makhluk spiritual dan rasional, sebagai makhluk yang terdiri dari fisik dan psikis, dan makhluk individual dan sosial, serta dari beragam etnis dan lain sebagainya. Nah, di sinilah pentingnya melabuhkan Islam kontekstual, Islam yang tidak melupakan dimana manusia berpijak di muka bumi. Islam yang berkelindan dengan ajarannya tanpa menihilkan budaya dalam sendi-sendi kehidupan. Islam yang mampu melahirkan perdamaian abadi tanpa harus mengangkat senjata manakala berhadapan dengan mereka yang non-muslim. Islam yang berlandaskan kasih-sayang untuk semesta alam.

Yang perlu diperhatikan adalah Islam kontekstual bukanlah aliran atau pun agama baru. Namun ia merupakan bentuk penyerapan ajaran Nabi Muhammad dengan tanpa menihilkan budaya nusantara. Inilah Islam yang tidak melupakan tradisi leluhur dan tidak pula

melupakan ajaran Nabi Muhammad. Pada drajat ini pula Islam kontekstual mampu berbicara lebih dari persoalan ketauhidan. Ia bergerak kearah cita-cita sosial yang terkait dengan humanisme serta rasa keadilan dan ekonomi. Islam yang semacam ini tentunya tidak menafikan ideal moral universal yang terkandung dalam kitab suci. Alhasil manusia perlu melakukan kontekstualisasi nilai-nilai agama berdasarkan lokalitas yang mengitarinya dan sejarah yang dilaluinya.

3. Interaksi Manusia dengan Lingkungannya

Kiranya tidak hanya di kota-kota besar saja, ketika mendiskusikan beragam industry yang akhir-akhir ini—secara perlahan namun pasti—terus bermunculan menyesaki sudut-sudut lahan kosong. Bahkan, kota-kota kecil pun sekarang mulai dilirik guna menanamkan modal sebanyak-banyaknya untuk pembuatan beragam industry kecil maupun besar. Pertanyaannya, benarkah untuk mengurangi tingkat pengangguran diperlukan lahan-lahan industri baru? (Thalhah & Mufid, 2008). Penambahan lahan pekerjaan merupakan keniscayaan, jika kita ingin mengurangi tingkat pengangguran, ini logika dasar yang setiap orang bisa dipastikan menyetujuinya. Dilematis memang, ketika kita ingin mengembangkan lahan pekerjaan terkadang kesulitan mencari tempat yang sesuai untuk mendirikan bangunan yang mampu menampung puluhan pekerja bahkan ratusan. Yang demikian, karena tempat pekerjaan harus memenuhi beberapa criteria standar yang telah ditentukan, di antaranya (Thalhah & Mufid, 2008):

1. Bangunan industri harus sehat dan ramah lingkungan. Di sini dititikberatkan pada tempat pembuangan limbah hendaknya tidak mengganggu ekosistem sekitar;
2. Tidak mengganggu konsentrasi kenyamanan penduduk sekitarnya. Syarat ini diperuntukkan bagi industry besar yang cenderung menggunakan mesin-mesin bervolume besar.

Bagi syarat yang kedua mungkin tidak terlalu sulit memenuhinya namun untuk yang pertama bisa dipastikan tidak ada jaminan bagi tiap-tiap industri untuk memenuhinya. Hal ini disebabkan banyaknya faktor yang sampai sekarang masih sulit dipecahkan, diantaranya (Thalhah & Mufid, 2008):

1. Kebanyakan limbah dibuang melalui sungai sebelum sampai ke laut, jika jarak antara tempat industri dengan laut sekitar 16 km. maka, bisa dipastikan dalam jarak 5 km. saja limbah tersebut akan mencermati aliran sungai. Ini saja belum ditambah jika sungainya dangkal karena penumpukan sampah;

2. Kebanyakan limbah bersifat cair, sehingga meski tidak dibuang ke sungai dia akan meresap ke tanah. Apalagi, jika limbah tersebut mengandung zat kimia yang begitu banyak, lambat laun tanah yang sebelumnya lembab dan subur akan menjadi panas, sehingga sulit untuk ditanami. Dan walaupun tumbuh hasilnya pun lain disbanding dengan tanah yang mengandung air alami.

Oleh karena itu, setiap perseorangan, instansi pemerintah, atau pun lembaga swasta yang ingin membangun tempat industri, tidak sekedar berpikir atas banyaknya keuntungan yang dihasilkan melainkan, melestarikan keseimbangan ekosistem lingkungan sekitarnya harus lebih dulu diprioritaskan.

Menurut pandangan Thalhah dan Mufid, Fiqh Ekologi harus memperhatikan tiga aspek (Thalhah & Mufid, 2008):

1. Pembangunan tempat industri harus memerhatikan kelestarian hidup lingkungan sekitar;
2. Semaksimal mungkin pembuangan limbah industri tidak mencemari kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan penduduk sekitarnya;
3. Pembangunan tempat industri baru dapat dibenarkan sesudah melakukan dialog kesepakatan dengan masyarakat sekitarnya. Tanggungjawab ini tidak hanya milik para pengelola melainkan pemerintah juga ikut di dalamnya.

Zuhaily menuturkan, bahwa hubungan manusia dalam agama Islam terbentang pada tiga hal. Pertama, hubungan manusia dengan Tuhan. Kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ketiga, hubungan manusia dengan masyarakat. Semua hubungan tersebut yang sudah diatur dalam Islam akan berdampak pada kebaikan dan kebahagiaan manusia. Rasanya apa yang diungkapkan oleh Zuhaily dikembangkan pada empat hal. Adapun yang keempat adalah hubungan manusia dengan lingkungan. Pernyataan Zuhaily terkesan sangat eksklusif karena hanya membahas hubungan umat Islam dengan apa yang ada pada dirinya dan di luar dirinya. Oleh karena itu pernyataan itu, bisa dikembangkan pada semua umat manusia di muka bumi dari beragam agama, suku, dan ras. Dengan demikian, bisa jadi tidak hanya Islam, agama lain juga mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, dirinya sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

Al-Maraghi membagi akuntabel pada tiga hal (al-Maraghi, 1996):

Pertama: akuntabel hamba dengan Rabb-Nya; yaitu apa yang telah dijanjikan Allah kepadanya untuk dipelihara, berupa melaksanakan segala perintah-Nya, menjauhi segala larangan-Nya dan menggunakan segala perasaan dan anggota badannya untuk hal-hal yang

bermanfaat baginya dan mendekatannya kepada Rabb. Di dalam *atsar* dikatakan, bahwa seluruh maksiat adalah khianat kepada Allah.

Kedua, akuntabel hamba dengan sesama manusia; di antaranya adalah mengembalikan titipan kepada pemiliknya, tidak menipu, menjaga rahasia dan lain sebagainya yang wajib dilakukan kepada keluarga, kaum kerabat, manusia pada umumnya dan pemerintah.

Termasuk dalam akuntabel/amanah ini adalah keadilan para umara terhadap rakyatnya, dan keadilan para ulama terhadap orang-orang awam dengan membimbing mereka kepada keyakinan dan pekerjaan yang berguna bagi mereka di dunia dan akhirat; seperti pendidikan yang baik, mencari rezeki yang halal, memberikan nasihat dan hukum-hukum yang menguatkan keimanan, menyelamatkan mereka dari berbagai kejahatan dan dosa, serta mendorong mereka untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Seperti juga keadilan suami terhadap istrinya, seperti tidak menyebarkan rahasia masing-masing pihak, terutama rahasia khusus mereka yang biasanya tidak pantas diketahui orang lain.

Ketiga, akuntabel manusia terhadap dirinya sendiri, semisal hanya memilih yang paling pantas dan bermanfaat dalam masalah agama dan dunianya, tidak medahulukan melakukan hal yang berbahaya baginya di akhirat dan dunia, serta menghindari berbagai penyakit sesuai dengan pengetahuan dan petunjuk dokter. Hal ini memerlukan pengetahuan ilmu kesehatan, terutama pada waktu tersebar penyakit dan wabah.

Keempat, akuntabel manusia terhadap lingkungan, mengingat manusia merupakan *kehalifah fi al-ardhi*, manusia sebisa mungkin menjaga keindahan alam, di mana proses ini berjalan secara berkelanjutan. Yang keempat ini merupakan tambahan dari penulis.

Pedulih lingkungan adalah salah satu dari ciri khas politik hijau/ekologisme. Beragam alasan bisa dikemukakan, manusia harus berhati-hati (menjaga) lingkungan—kepedulian kepada lingkungan, karena itu kepentingan manusia (Sardar, 1984)(Nasr, 1990). Sebagaimana dituturkan Dobson di atas. Fenomena penghijauan lingkungan terdapat di Iran, istilah yang dipakai di sana adalah gerakan hijau (Nabavi, 2012)(Dabashi, 2010)(Dabashi, 2011) (*green movement*), gerakan ini merupakan gerakan sosial yang berupaya mempertahankan lingkungan.

4. Kontestasi Pemilu 2024

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan pada tahun 2024 akan menggelar pemilu dan pilkada (pemilihan kepala daerah). Pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, dewan perwakilan daerah (DPD) RI, serta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten atau kota. Sementara, pilkada bakal digelar pada 27 November 2024 melalui

gelaran pilkada, akan dipilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia.

Pada kaitannya soal kepentingan lingkungan dalam agenda politik, pemilu serentak ini menjadi momentum untuk bisa semakin memperjuangkan gerakan-gerakan narasi lingkungan, bahkan politik hijau. Karena aspek lingkungan kerap kali dikesampingkan oleh pemerintah. Sementara sangat mustahil mengharapkan partai-partai politik menjadi inisiator perjuangan lingkungan, dan terlebih justru belum ada partai politik di Indonesia yang mengusung ideologi hijau yang masuk secara struktural dalam pemerintahan. Padahal untuk memperjuangkan lingkungan secara mutlak diperlukan keberpihakan ideologis dan gerakan yang sistematis. Hal ini akan menjadi tahun politik besar-besaran di Indonesia dalam memilih calon-calon pemimpin di pemerintah pusat maupun untuk pemerintah daerah. Juga menjadi kesempatan bagi setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk turut, dan ikut bertanggung jawab terhadap lingkungannya dengan jeli dan bijak memilih pemimpin dengan memperhatikan program-programnya yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability).

Akan tetapi, menurut laporan Environmental Risk Outlook 2021 yang dikeluarkan oleh Verisk Maplecroft (2020) menyatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap isu lingkungan sebagai masalah utama, hanya sebesar 33%. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kesadaran dalam memandang permasalahan lingkungan terendah kedua setelah Afrika Selatan. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendorong isu lingkungan, akan berakibat memperparah dengan semakin tidak tertariknya para partai atau elite politik untuk memperhatikan dan menjadikan isu lingkungan sebagai agenda politiknya. Dengan demikian dapat dipahami, menjelang pemilu 2024 mendatang, peluang untuk menyelaraskan agenda politik nasional lintas partai dengan narasi terkait agenda lingkungan menjadi penting untuk diketahui. Meskipun ada dorongan terus-menerus terkait aksi iklim dari masyarakat sipil dan gerakan lingkungan—terutama sejak COP Bali pada 2007—perubahan iklim hingga saat ini nyatanya belum menjadi salah satu agenda utama dalam diskursus platform politik partai maupun kandidat di Indonesia. Bahkan tujuh tahun terakhir tampaknya telah membawa Indonesia pada jalur yang menjauh dari isu agenda iklim serta perlindungan lingkungan dikarenakan fokus agenda pemerintahan Jokowi saat ini masih tertuju pada upaya untuk menarik investasi asing serta pertumbuhan ekonomi, dibanding memperhatikan isu lingkungan.

Permasalahan lain dari ketidakhadiran PHI adalah pemilu, salah satu di antaranya Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik merupakan upaya dari para oligarki untuk mempertahankan pendapatannya dari pihak-pihak yang mengancam dalam hal ini partai baru. Misalnya syarat pendirian partai politik harus terdapat di 100% provinsi, 75% Kabupaten/kota dan 50% kecamatan (Pasal 3). Selain itu pada UU tersebut batas maksimal sumbangan ke partai politik dalam 1 tahun adalah 7,5 Miliar, naik 3,5 Miliar dari UU Partai Politik Tahun 2008. Selain sangat memberatkan, masalah lainnya adalah persyaratan itu hanya berlaku untuk partai baru, sedangkan tidak dengan partai lama, hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2018. Artinya, setiap partai mesti memiliki basis massa dan modal yang kuat dan partai tanpa pemodal cenderung sulit untuk berkompetisi dan pada saat yang sama aturan yang diproporsional tersebut akan menguntungkan partai besar (Bachtiar et al., 2020). Artinya hambatan pembentukan partai politik hijau tidak serta merta dihadapkan dengan keinginan atau kesadaran masyarakat, tetapi juga terdapat adanya pengaruh dari sistem.

Proyeksi pemilih pada pemilu 2024 nanti, akan didominasi oleh generasi muda. Hasil survei CSIS (Centre for Strategic and International Studies) menyatakan bahwa generasi Z dan milenial dengan rentang usia 17-39 tahun mencapai 60% dari total pemilih di Indonesia. Artinya terdapat lebih dari setengah dari total peserta pemilih merupakan generasi muda. Dengan demikian, generasi muda seharusnya bisa menjadi pengarah dan penentu dalam mendorong narasi isu lingkungan hadir dalam setiap agenda elite politik saat ini. Walaupun secara umum, dominasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan masih menunjukkan memiliki kesadaran yang rendah terhadap pentingnya isu lingkungan dalam agenda politik. Tetapi, khusus bagi generasi muda, berdasarkan hasil temuan survei Indikator (2021) tingkat kesadaran dari pemilih muda dan pemula (Gen-Z dan millennial) lintas partai politik atas isu perubahan iklim dan lingkungan sudah sangat tinggi mencapai 82%. Mayoritas pemilih kelompok usia Gen-Z dan milenial (81%) lintas partai politik di Pileg 2019 lalu secara meyakinkan mayoritas menjawab perlindungan dan pelestarian lingkungan harus diutamakan meski harus memperlambat pertumbuhan ekonomi. Persepsi pemilih muda atas tingkat perhatian partai-partai politik di Indonesia dalam mengatasi krisis iklim masih rendah. Tidak ada partai politik yang dominan dipersepsi oleh pemilih pemula memberikan perhatian yang cukup sejauh ini terkait isu krisis iklim atau pelestarian lingkungan. Ini merupakan peluang strategis bagi partai-partai dan para elite politik untuk mulai memperhatikan melibatkan berbagai stakeholders masyarakat sipil dalam penyusunan agenda krisis iklim ke dalam

platform partai guna menarik serta mengetahui apa yang menjadi perhatian atau fokus dari blok strategis pemilih muda dan pemula kalangan Gen_Z dan milenial, sehingga dapat meraih suara mereka yang mencapai sekitar 60% dari populasi pemilih di Pemilu 2024.

Aspirasi mengenai kerusakan lingkungan dan dampak kerusakannya terus disuarakan oleh kalangan civil society, agar tidak luput dari agenda kepentingan elite partai politik. Baik besar atau kecilnya gaung aspirasi tersebut yang dibawakan setiap kontestasi pemilu, menunjukkan bahwa isu lingkungan tidak pernah absen setiap tahunnya. Konsistensi itulah yang akhirnya digunakan oleh para elite politik untuk mendekati kelompok-kelompok kepentingan tersebut dalam meraih suara mereka. Akan tetapi, agenda-agenda lingkungan nyatanya sangat jarang dibawakan oleh para elite politik sebagai agenda politik utamanya sendiri ketika terpilih atau setelah berhasil memegang jabatan. Narasi-narasi isu lingkungan tidak cukup besar digaungkan para elite dan partai politik.

5. Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2024

Paslon satu mengusung visi Indonesia adil Makmur untuk semua, karena melihat banyaknya ketimpangan di Indonesia dan kemakmuran harus dirasakan semua warga negara. Programnya adalah kemandirian pangan, keadilan ekologis berkelanjutan. Ada 14 program utama diantaranya : 1) membudayakan perilaku hemat energi melalui edukasi masyarakat dan insentif kebijakan, serta memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi melalui pendekatan data dan teknologi. 2) mewujudkan perencanaan produksi dan ekspor energi yang berorientasi kepentingan nasional, dengan mempertimbangkan keamanan suplai dan Cadangan dalam negeri. 3) Menjalin Kerjasama dengan negara produsen energi. 4) meningkatkan pasokan BBM, 5) memperkuat tata Kelola importasi energi. 6) menerapkan teknologi terkini. 7) melakukan renegotiasi dan realisasi produksi energi. 8) melaksanakan program bioenergy, panas bumi dll. 9) memaksimalkan peran panas bumi. 10) membuka peluang Kerjasama Masyarakat dan komunitas. 11) inovasi pembiayaan. 12) green financing. 13) membentuk dana abadi untuk riset. 14) kendaraan umum berbasis listrik

Paslon dua mempunyai visi Bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 20245. Programnya adalah produktifitas lahan pertanian, menjamin pelestarian lingkungan. Ada 10 program utamanya, diantaranya : 1) mengurangi ketergantungan energi fosil. 2) mengembalikan tata Kelola migas. 3) skema insentif cadangan energi nasional. 4) revisi aturan terkait investasi. 5) mendirikan kilang. 6) memperluas konversi BBM gas ke Listrik. 7) melanjutkan program Listrik tenaga uap. 8) melanjutkan program biodiesel. 9)

mengembangkan bioethanol dari singkong dan tebu. 10) mengembangkan energi hijau alternatif.

Paslon tiga menggusung visi mewujudkan negara maritim yang adil dan Lestari. Programnya adalah mempercepat perwujudan lingkungan hidup berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru, yaitu ekonomi hijau yang berbasis energi dan ekonomi biru dari sektor kelautan. Selanjutnya program tersebut secara spesifik diantaranya : 1) harmoni hutan. 2) pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. 3) adaptasi dan mitigasi krisis iklim penghijauan wilayah pesisir. 4) penerapan integrasi resiko lingkungan, sosial dan tata kelola. 5) transisi energi yaitu energi terbarukan. 6) desa mandiri energi. 7) pengelolaan limbah ramah lingkungan. 8) ekonomi sirkuler.

KESIMPULAN

Berawal dari fenomena maraknya tindakan yang anti lingkungan, lahirlah Teori politik hijau yang berupaya memberikan kritik terhadap manusia yang sudah menjadi aktor dominan dalam kerusakan lingkungan. Disini para pengembang politik hijau mempunyai tujuan, yaitu untuk mengejawantah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini dimaksudkan untuk memikirkan dan mengupayakan kelestarian alam dan lingkungan untuk generasi saat ini dan di masa yang akan datang.

Islam menawarkan konsep fiqih ekologi yang membahas tentang kepedulian terhadap lingkungan khususnya lingkungan hidup. Pembangunan industry harus didasarkan kepada efek lingkungan yang beragam khususnya berkaitan dengan ekosistem dan Masyarakat. Tentunya pola komunikasi dengan mempertimbangkan kemaslahatan untuk semua menjadi jaminan terselenggaranya program pengembangan.

Pemilu 2024, memberikan pesona keindahan yang dipaparkan oleh ketiga paslon presiden dan paslon wakil presiden dengan visi dan misi yang komprehensif, isu tentang lingkungan menjadi paparan elok untuk menggaet suara di Masyarakat. Namun, bukti nyata yang dapat dirasakan adalah setelah terpilih menjadi presiden dan wakil presiden mampu memberikan efek kebijakan baik yang berkaitan dengan hukum perundang – undangan, maupun kebijakan investasi dan kebijakan pemeliharaan lingkungan yang proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Barry, Jhon, *Green Political Theory*, (London: Queen's University Belfast, 2017)
Bradford, Alina, “*Science & the Scientific Method: A Definition*”, dalam <http://www.livescience.com/20896-science-scientific-method.html> diakses pada tanggal

- 28 September 2016.
- Dabashi, Hamid, *Iran, The Green Movement and The USA The fox and Paradox* (London & New York: Zed Books, 2010)
- _____, *The Green Movement in Iran* (London & New York: Transaction Publishers, 2011)
- Dobson, Andrew, *Green Political Thought*, (London and New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2007)
- Gottlieb, Sheldon, “Definition of Science”, dalam <http://www.gly.uga.edu/railsback/1122sciencedefns.html> diakses pada tanggal 28 September 2016.
- Hidayat, Herman, *Politik Ekologi: Pengelolaan Taman Nasional Era Otda*, (Jakarta: LIPI, 2011)
- Hossein Nasr, Sayyed, *Man and Nature The Spiritual Crisis in Modern Man* (London: Mandala Unwin Paperbacks, 1990)
- Januaris, Fabian, “Sikap Presiden Jokowi Terkait Pabrik Semen Rembang”, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/20/20152521/apa.sikap.presiden.soal.penal.akan.pabrik.semen.di.kendeng>. diakses pada tanggal 29 Maret 2017.
- Mushtafa al-Maraghi, Ahmad, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Maktabah wa Mathba’ah Mustafa al-Bani, 1996)
- Nabavi, Negin, (ed), *Iran from Theocracy to The Green Movement* (New York: Palgrave Macmillan, 2012)
- Putri, Rizca, “Bencana Tahunan Kabut Asap Riau dalam Pandangan Politik Hijau”, *Jurnal Phobia*, Vol. 01, No. 03, (Maret, 2014)
- Rahmat, Basuki, & Sinuko, Damar, “Petani Kendeng Terus Tuntut Jokowi Stop Proyek Semen Rembang”, dalam <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170319053612-20-201141/petani-kendeng-terus-tuntut-jokowi-setop-proyek-semen-rembang/> diakses pada tanggal 29 Maret 2017.
- Sardar, Ziauddin, (ed), *The Touch of Midas: Science, values and environment in Islam and the West*, (India: The Other India Press, 1984)
- Toke, Dave, *Green Politics and New-Liberalism*, (London: Macmillan Press LTD, 2000)
- Thalhah, M., dan Mufid, Achmad, *Fiqih Ekologi: Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci*, (Yogyakarta: Total Media, 2008)
- Zuhaily, Wahbah, (al), *Nazariyah al-Darurah al-Syar’iyah*, (Beirut: Muasasah al-Risalah, tt)